

Desember 2008

BULETIN WAHANA KOMUNIKASI PROGRAM MFP 99



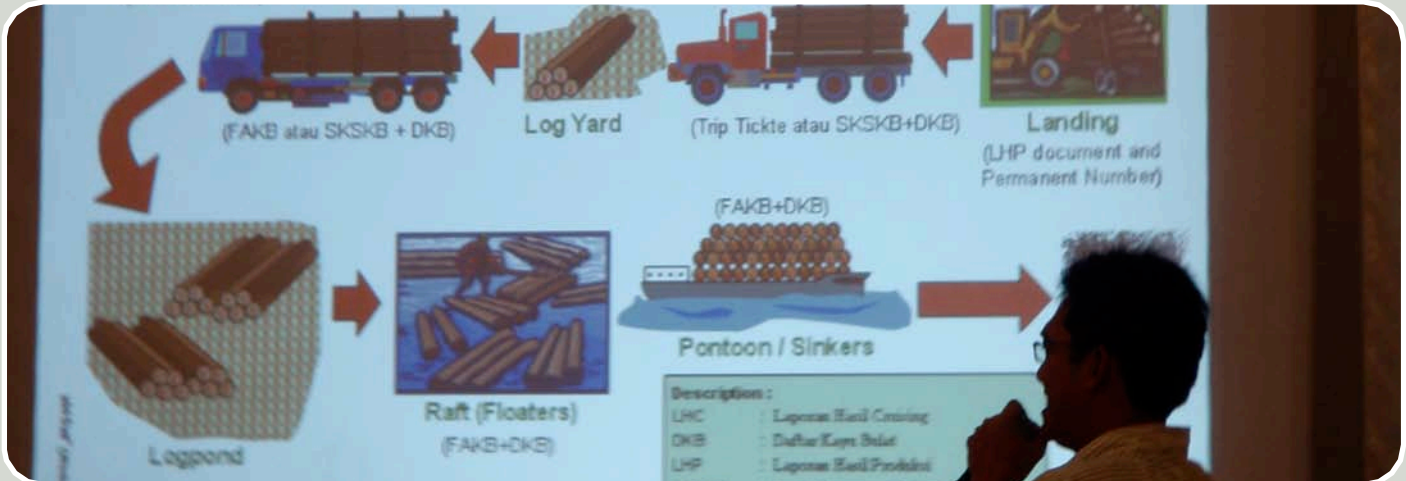
Ministry of
Forestry

DFID

Department for
International
Development



KEHATI
INDONESIAN
BIODIVERSITY
FOUNDATION



MFP & SCF SOSIALISASIKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

HOTEL HORISON, MAKASAR, 19-22 NOVEMBER 2008

MFP dan Sulawesi Community Foundation berkolaborasi dalam menyelenggarakan workshop dan pelatihan verifikasi sistem legalitas kayu (SVLK) atau yang disebut juga Timber Legality Assurance System

Program MFP tahun 2008-2009 ini memang menetapkan SVLK sebagai prioritas, dan disemunasi informasi tentang SVLK merupakan muara dari kegiatan tersebut. Di sisi lain Dephut yang tengah menggalakan pemberantasan illegal logging berupaya mengembangkan TLAS sebagai instrument pengawasan perdagangan kayu yang diharapkan. Menurut Dr. Agus Sarsito saat memberi sambutan workshop

menyatakan pihaknya memang berupaya mensosialisasikan dan menyusun SVLK sebagai panduan yang bersifat mengikat secara hukum. Selain sudah ada UU-nya, tujuan SVLK sebenarnya juga untuk kepentingan menjaga kelestarian hutan penyangga kehidupan dan perekonomian.

Sementara itu mewakili MFP II, Bapak Edy Nugroho, seconded mengungkapkan terima kasihnya kepada SCF yang mengambil inisiatif penyelenggaraan sosialisasi SVLK yang memang tepat waktu dan menguatkan inisiatif dari Departemen Kehutanan Indonesia.



Dr. Agus Sarsito, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Hutan Produksi.

Selain membuka training workshop, Dr. Agus juga menjadi narasumber utama workshop SVLK mewakili Departemen Kehutanan

Agenda dan Tujuan Workshop

Sesuai kerangka acuan workshop ini, ada 3 tujuan yang ingin dicapai : 1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK); 2) Mengetahui dan memahami berbagai prasyarat / kriteria, dan identifikasi hambatan dalam pemenuhan prasyarat SVLK di tingkat daerah. 3) Merumuskan rencana diseminasi dan strategi implementasi SVLK di daerah. Pemenuhan tercapainya tujuan itu dilakukan dengan mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan materi yang tepat.

Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Dephut sebagai wakil pemerintah memaparkan instrumen kebijakan legalitas kayu Indonesia. Menurutnya penyusunan dan implementasi SVLK selain untuk menghapus praktek illegal logging, juga sebagai tuntunan global pasar kayu dengan pengelolaan yang lestari.

Pembicara ke dua Sdr. Nurcahyoadi yang memaparkan hubungan SVLK dengan pemberantasan ilegal logging dan sertifikasi hasil hutan.

Pembicara ketiga adalah Agus Eka Putra dari Tropical Forest Trust Semarang, seorang praktisi yang memaparkan hubungan SVLK dengan CBFM. Ia juga menceritakan pengalaman lembaganya yang berhasil membantu penerapan sistem sertifikasi hasil kayu jati di hutan tanaman rakyat di Konawe Selatan bersama Koperasi Hutan Jaya Lestari.

Alan Purbawiyatna praktisi yang turut menyusun SVLK memberikan 2 materi yaitu tentang prinsip, kriteria dan indikator untuk verifikasi legalitas kayu di hutan negara baik berbasis unit manajemen maupun tidak dan areal non hutan hak. Materi lainnya adalah prinsip, kriteria dan indikator untuk standar verifikasi legalitas kayu untuk pengangkutan, pengolahan, perdagangan dan pemindahtanganan

Di hari kedua, materi yang diberikan adalah pemahaman atas modus kejahatan kayu yang menjadi bagian terorganisirnya praktek illegal logging oleh Dr. Agus Setyarso yang juga konsultan di MFP II dan anggota DKN. Hasbi Hasbilah dari TFF memaparkan rancangan tata hubungan pelaksanaan verifikasi legalitas kayu beserta norma dan panduan teknisnya.

Di hari ketiga, Dr. I Made Gelgel menyampaikan skema pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terkait PP6/07 juncto PP3/08 sehingga memberikan pemahaman peserta kaitan upaya pemberdayaan dengan implementasi SVLK di masa depan.



Nurchahyo Adi yang disapa Ucok tengah mempresentasikan makalah hubungan SVLK dengan pemberantasan Illegal logging. Disampingnya Maidiward dari Dephut memperhatikan dengan serius. Di latarbelakang, MC cantik SCF memperhatikan abang Ucok.



FGD : upaya membumikan gagasan SVLK untuk peran para pihak

Untuk memberikan respon pada peserta atas workshop SVLK, selain disediakan waktu yang cukup untuk mengajukan pertanyaan di setiap sesi, pada hari terakhir, pelatihan SVLK secara khusus memfokuskan pada FGD dengan 3 tema yaitu 1)memberi input pada sistem berifikasi, 2) Masalah dan tantangan yang dihadapi di daerah/ regional dan 3) Peran para pihak yang dapat dilakukan.

Tiga kelompok yang anggotanya telah dipilih oleh panitia mewakili forum multipihak yang didampingi narasumber dalam menggali setiap persoalan dan usulan yang mungkin dapat menjadi masukan bagi kelompok. Upaya ini ditempuh untuk memberikan kesempatan

secara khusus kepada peserta mendiskusikan berbagai persoalan, menganalisisnya dan menempatkannya dalam prioritas usulan dan menggali berbagai jalan keluar atau perspektif bersama para pihak yang duduk dalam ke tiga kelompok yang ditetapkan tadi.

Dari hasil FGD masing-masing kelompok mempresentasikannya dan memperlihatkan banyaknya pemikiran, gagasan bersama yang dapat dijadikan masukan bagi implementasi SVLK ke depan. Berbagai aspek implementasi SVLK dikupas dalam perspektif multipihak direpresentasikan melalui 3 kelompok dalam pelatihan ini.

STATISTIK PESERTA WORKSHOP	PEMDA	NGO	AKADEMISI	PRIVATE
	<p>10 laki:9 dari sulawesi, 1 asosiasi pemerintahan kabupaten Jakarta dan 1 perempuan dari Lampung Tengah</p>	<p>15 peserta laki-laki dan 1 perempuan mewakili jawa, sumatera, sulawesi, nusa tenggara</p>	<p>1 perepmpuan dari UNHAS Sulsel, 1 laki-laki dari UNLAM-Kalsel</p>	<p>1 laki-laki dari Jogjakarta</p>